

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ekologi Politik

Ekologi politik adalah cabang ilmu yang memeriksa hubungan antara lingkungan dan politik. Kajian teori mengenai ekologi politik mencakup berbagai pendekatan dan konsep untuk memahami bagaimana kebijakan politik, sistem politik, dan dinamika kekuasaan berinteraksi dengan lingkungan alam. Menurut Piers Blaikie¹ Karena banyaknya epistemologi dan metodologi yang digunakan dalam istilah "ekologi politik", belum ada definisi yang konsisten. Namun demikian, ekologi politik adalah studi tentang fenomena, proses, dan bagaimana hubungan politik memengaruhi keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, tujuan ekologi politik tidak hanya memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya perubahan lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk menciptakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.²

Metode ini melihat kerentanan tertentu dari populasi manusia dan kemudian menemukan delapan kekuatan global utama yang menyebabkan kerentanan tersebut. Ini adalah pola penyebaran informasi global, akses ke pasar global, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, tekanan ekonomi global, degradasi lingkungan, perubahan lingkungan global, dan perang. Salah satu dari faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan mengapa sebuah bencana terjadi; dengan kata lain, rangkaian penyebab ini memberikan alat kaji yang cukup fleksibel untuk mengevaluasi seberapa penting elemen-elemen di atas dalam membentuk bencana, serta hubungan mereka dengan proses pembangunan dan bencana.³

¹ Piers Blaikie, "A Review Of Political Ecology: Issues, Epistemology And Analytical Narratives," *Zeitschrift Für Wirtschaftsgeographie* 43, No. 3–4 (1999): 131–47.

² Sudikan Yuana Setya, *Ekologi Sastra* (Lamongan: Pustaka Ilalang, 2016).

³ Rizki Amirulloh, "Relasi Kekuasaan Dan Lingkungan Hidup Dalam Novel Tanjung Kemarau Karya Royyan Julian: Kajian Ecopolitics Piers Baikie," *Jurnal Sapala* 1, No. 1 (2018): 1–10.

Selanjutnya, ekologi politik berkembang menjadi studi yang bersifat politis yang mempelajari konflik sebagai bagian dari negosiasi. Studi ini mencakup berbagai disiplin ilmu dan mencakup skala spasial dan temporal. Dengan perkembangan ini, ada peluang untuk penelitian lapangan di tingkat mikro dan makro, yang biasanya berasal dari negara-negara (wilayah) yang berkembang dan memfokuskan pada kisah-kisah konflik dan konteksnya, dikombinasikan dengan analisis lebih luas di tingkat global. Selanjutnya, ini menghasilkan analisis ekologi politik yang lengkap, yang didefinisikan sebagai "analisis terhadap ekonomi politik, aktor dan politik mereka, serta representasi mereka yang saling berkonflik.

Dianggap bahwa ekologi dapat menjelaskan fenomena bahwa sastra melibatkan manusia sebagai bagian integral dari alam. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sudikan menjelaskan dalam bukunya berjudul Ekologi Sastra bahwa pendekatan ekologi politik adalah pendekatan yang mencakup berbagai metode dan berbagai aspek, termasuk ekologi, ekonomi, sosial, politik, dan sejarah. Namun, ciri khas pemikiran ekologi politik Blaikie adalah penekanan pada aktor. Metode ini berpusat pada pelaku.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh Wisner et al. dalam buku mereka berjudul *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disaster*, bencana tidak akan terjadi sampai ancaman menerjang wilayah yang rentan, yang biasanya dihuni dan/atau dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang rentan. Pendekatan ini mengakui pentingnya ancaman alamiah sebagai peristiwa pemicu, tetapi menunjukkan berbagai cara sistem sosial menghasilkan bencana, membuat beberapa kelompok manusia lebih rentan dan lebih sulit untuk pulih daripada yang lain. Banyak perbedaan antar kelompok sosial, seperti kelas, gender, etnis, atau kondisi disabilitas, yang menentukan ketimpangan ini. Ketimpangan seperti ini lebih banyak disebabkan oleh benturan relasi antar manusia,

yaitu struktur sosial yang ditentukan oleh berbagai faktor yang tidak ada hubungannya dengan alam.⁴

Menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai arena terbuka adalah salah satu kontribusi penting dari bidang penelitian ini. Alam sekarang dilihat sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Bukan lagi hanya mengamati perubahan alam yang terlihat "nyata" atau yang belum diteliti (yang merupakan domain saintifik murni). Bukan hanya kemajuan penelitian saintifik yang membuat lingkungan alam menjadi "isu", tetapi juga faktor ekonomi dan politik yang secara konsisten mengubah dan mengubah representasi alam yang sudah mapan.

Dengan cara yang sama, bencana sering dianggap sebagai "peristiwa" tanpa mempertimbangkan sejarahnya dan berbagai faktor di luar tempat kejadian. Selain itu, terlihat kecenderungan untuk berkonsentrasi pada bagaimana individu atau kelompok menanggapi bencana. Ini menghasilkan lebih banyak saran tentang tanggap bencana (respons) dan pemulihan (recovery) setelah bencana, yang harus dilakukan oleh kelompok yang terkena dampak. Terakhir, ada kecenderungan untuk mengabaikan struktur sosial yang menentukan tingkat keterpaparan terhadap resiko bencana. Akibatnya, orang sering mengabaikan kenyataan bahwa individu tertentu memiliki kemampuan pemulihan yang berbeda.⁵

2. *Enviromentalisme*

Perilaku kolektif (*collective behavior*) sangat berpengaruh dalam gerakan sosial (*social movement*), karena gerakan tersebut berfungsi sebagai sarana menyatukan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka. Gerakan sosial adalah upaya terstruktur yang bertujuan untuk mendorong atau menghambat perubahan sosial. Salah satu gerakan tersebut adalah *enviromentalisme*,

⁴ Ian Davis And Ben Wisner Piers Blaikie, Terry Cannon, *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability And Disasters (Second Edition)* (London: Routledge, 2004).

⁵ Piers Blaikie, Terry Cannon.

yang juga salah satu gerakan sosial yang mempunyai pelopor terhadap perlindungan lingkungan hidup. Tindakan yang diambil untuk tujuan perlindungan lingkungan tidak frontal. Namun dengan gerakan hijau yang berakar pada paham lingkungan hidup, menggunakan serangkaian taktik untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk peradaban manusia terhadap ekosistem dan lingkungan. Metode-metode ini mencakup segala hal mulai dari aktivisme akar rumput di jalanan hingga inisiatif pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat, serta upaya lobi politik. Dengan menggunakan berbagai metode ini, gerakan *enviromentalisme* berupaya mendidik dan memberikan informasi kepada individu tentang pentingnya melindungi alam kita.⁶

Dalam hal ini *enviromentalisme* mempunyai tiga konsep utama, yakni. *Pertama*, *Environmentalisme* merupakan suatu konsep yang mempunyai keterkaitan pada falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar disini merupakan perbahasan pada hakikat seutuhnya korelasi manusia dan alam sekitar. Falsafah alam sekitar dapat diartikan sebagaimana sebenarnya perilaku yang baik pada alam sekitar serta bagaimana pula perbuatan yang merusak keseimbangannya. *Kedua*, *enviromentalisme* berkaitan erat dengan perjuangan ideologi lingkungan hidup. Istilah "ideologi" berkaitan dengan keyakinan dan nilai-nilai. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada doktrin yang dianut oleh individu atau kelompok kolektif. Ini merupakan inti dari upaya mendasar mereka. *Ketiga*, *enviromentalisme* bertujuan untuk menginternalisasikan ideologi ini ke dalam kesadaran kolektif, sebagai seruan bertindak bagi individu dalam segala aspek kehidupan. Hal ini terkait erat dengan gagasan untuk mempromosikan pola pikir berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep lingkungan hidup mencakup penerapan kebijakan dan praktik idealis di berbagai bidang, dengan tujuan menjaga lingkungan. Dalam istilah yang

⁶ Dewi Rahayu Et Al., "Gerakan Zero Waste Sebagai Bentuk Peduli Pada Lingkungan Hidup Di Kota Tangerang Selatan," *Ijd-Demos* 3, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.37950/Ijd.V3i2.98>.

lebih sederhana, hal ini melibatkan pengembangan dan pelaksanaan rencana perlindungan lingkungan.⁷

Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tapi juga perintah agama. Menurut Syekh Kholil, Islam dihadirkan dalam muqaddimahny sebagai solusi segala permasalahan kehidupan. Dari ritual hingga moralitas individu, agama mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan, pembahasan tentang menjaga lingkunganrupanya hadir dalam dialog antara malaikat dan Tuhan yang terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁸

Di dalam ayat ini, Allah membuat keputusan untuk menunjuk manusia sebagai khalifah bukan karena kebetulan atau tanpa alasan. Sebaliknya, itu adalah karena Dia telah mengetahui bahwa Ini adalah kemampuan manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna sejak penciptaannya. Untuk mendukung tugas kekhilafahan, manusia diberi berbagai potensi. Potensi ini memungkinkan

⁷ M.A Diansari Solihah Amini, S.Ip, "Kampanye Gerakan Hijau Sebagai Mitigasi Bencana Dalam Kerangka Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Lantip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ekonomi* Vol 06. (2016).

⁸ "Surat Al-Baqarah Ayat 30," Tafsirweb.Com, N.D., <https://Tafsirweb.Com/290-Surat-Al-Baqarah-Ayat-30.Html>.

mereka untuk menyusun ide-ide, membuat, mengembangkan, dan mengemukakan ide-ide tersebut, serta melaksanakannya.

Di dalam al-Qur'an, semua kerusakan lingkungan hidup baik dari faktor internal maupun eksternal tidak lain merupakan akibat dari ulah dan keserakahan manusia dengan cara mengeksploitasi alam lingkungan secara habis-habisan. Oleh karena itu, sejak awal Allah telah merekam adanya akibat ulah manusia tersebut, sebagaimana tercantum dalam QS. alRum: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Selain aspek-aspek lingkungan di dalam al-Qur'an yang disebutkan di atas, al-Qur'an juga berbicara secara tegas dan spesifik tentang krisis lingkungan. Ketika berbicara tentang kerusakan lingkungan al-Qur'an menggunakan beberapa term, antara lain fasād, halaka dan sā'a. Secara leksikal, kata fasād – yang merupakan antonim dari ṣalāh (manfaat, berguna)– bermakna ,keluar dari keseimbangan (khurūj al-sha'i 'an ali'tidāl) (sesuatu yang keluar dari keseimbangan). Sementara cakupan makna term fasād mencakup jiwa, fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan yang semestinya.

Para mufassir klasik umumnya memaknai kata fasād dalam ayat ini sebatas kerusakan sosial dan kerusakan spiritual, sebagaimana pendapat Ibn Katsīr (w. 1373 M) yang mengartikan fasād dalam ayat di atas dengan perbuatan syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala pelanggaran terhadap Allah. Sementara ulama kontemporer, seperti Yūsuf al-Qardāwī memahami fasād sebagai krisis lingkungan secara fisik yang mengakibatkan berbagai bencana, seperti penyebaran penyakit, krisis pangan, krisis

sumber daya alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan yang membahayakan seluruh spesies bumi.

Menurut ayat ini, kerusakan dan krisis lingkungan (fasād) diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian ekologi. Selain itu, krisis lingkungan juga pada hakikatnya juga diakibatkan oleh krisis mental manusia. Karenanya, para ahli tafsir memahami bahwa penyebab kerusakan tersebut bukan perilaku manusia secara langsung dalam konteks kerusakan alam, seperti penebangan pohon secara ilegal, membuang sampah secara sembarangan, pembuangan limbah industri yang tidak sesuai amdal, dan lain-lain, tetapi mengacu kepada perilaku non-fisik, seperti kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan dan segala bentuk kemaksiatan.

Penggunaan teori ini diharapkan dapat menjawab problematika lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Jepara. Gerakan-gerakan peduli terhadap lingkungan sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian alam. Konsep ini dapat terwujud bilamana adanya sinergitas dari komunitas peduli lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Dimana semuanya mempunyai peran penting dalam menangani isu lingkungan yang semakin menjamur di Kabupaten Jepara.

3. Partai Politik

Partai politik adalah bagian penting dari sistem demokrasi, baik di negara maupun di seluruh dunia. Negara yang tidak memiliki partai politik bahkan dianggap tidak demokratis. Karena partai politik pada hakikatnya merupakan representasi dari kebebasan individu untuk membentuk kelompok berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, syarat utama untuk pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dipilih secara teratur dan membutuhkan kebebasan politik untuk membuat pemilihan bermakna.⁹

Maurice Duverger mengatakan bahwa kata "partai" berasal dari kata Latin "pars", yang berarti "bagian." Pengertian ini menunjukkan bahwa ada bagian lain karena

⁹ Thomas Meyer, "Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis," *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 2012, 1–46.

ia adalah suatu bagian. sehingga, idealnya, tidak mungkin dalam suatu Negara hanya ada satu partai politik untuk memenuhi pengertian tersebut. Selain itu, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa istilah "part" berasal dari kata "part" dalam bahasa Inggris, yang berarti "bagian" atau "golongan." Dia mengatakan bahwa kata "partai" mengacu pada kelompok orang yang memiliki kesamaan dalam hal ideologi, agama, tujuan, atau kepentingan. Pengelompokan itu sendiri adalah kelompok yang berbeda berdasarkan bidang aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, atau organisasi politik. Dengan waktu, istilah partai lebih banyak dikaitkan dengan organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat di bidang politik.

Selain itu, Miriam Budiarjo menggambarkan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan politik dan memperoleh kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Menurut definisi Edmund Burke, partai politik adalah kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk menyebarkan usaha yang telah disepakati untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Ware menyimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang mempengaruhi Negara dengan menguasai posisi strategis dalam pemerintahan. Partai politik biasanya memiliki lebih dari satu kepentingan dan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan tersebut.¹⁰

Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain dengan pandangan berbeda. Menurut R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok orang yang sedikit terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan menggunakan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk

¹⁰ Al-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013).

menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Menurut Budirdjo, partai politik adalah sebuah kelompok orang yang bersatu yang memiliki tujuan, prinsip, dan nilai yang sama. Memperoleh kekuasaan politik dan memperoleh posisi politik secara konstitusional untuk melaksanakan kepentingan mereka (kebijakan)¹¹.

Partai politik awalnya muncul sebagai hasil dari perselisihan ideologi antara kekuatan yang dominan di masyarakat. Ia muncul sebagai perwakilan kebutuhan warga negara¹². Negara-negara Eropa Barat adalah rumah bagi partai politik pertama. Karena gagasan bahwa rakyat harus diperhitungkan dan terlibat dalam proses politik, partai politik telah muncul secara spontan dan berkembang menjadi hubungan antara rakyat dan pemerintah. Karena mereka memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (negara) dan warga negaranya (warga negara), partai politik sering disebut sebagai pilar demokrasi¹³. Dalam sejarah partai politik, munculnya partai-partai politik di negara-negara yang berbeda tidak selalu terjadi dengan cara yang sama. Namun, ada satu hal yang jelas, yaitu bahwa munculnya partai-partai politik berkorelasi dengan peningkatan demokratisasi, terutama dalam hal hak-hak warga negara. Sebagaimana dikutip oleh Kacung, Evereth Call Ladd menyatakan bahwa partai politik adalah "anak-anak egalitarianisme", yang berarti bahwa partai politik adalah pilar demokrasi yang harus tetap ada di negara modern¹⁴.

Salah satu tugas utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk melaksanakan program-program yang didasarkan pada ideologi tertentu. Karena tidak memiliki suara terbanyak dalam pemilu, partai politik bertindak sebagai oposisi. Partai politik juga dapat melakukan banyak hal lain, seperti

¹¹ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

¹² Firman Subagyo, *Menata Partai-politik Dalam Arus Demokrasi* (Jakarta: Rmbooks, 2009).

¹³ Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2015).

¹⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).

sosialisasi politik, berpartisipasi dalam politik, merekrut orang, menunjukkan kepentingannya, berbicara tentang politik, mengendalikan konflik, dan mengontrol politik¹⁵.

Adapun jika diuraikan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah bentuk Orientasi terhadap politik dan sikap politik. Nilai-nilai yang disosialisasikan dalam ranah politik. Kehidupan masyarakat merupakan tempat berlangsungnya pembangunan, adapun cara penyampaian dapat dilakukan melalui : Proses rekrutmen politik melibatkan seleksi dan pendidikan individu mengenai ideologi dan prinsip politik.
- b. Rekrutmen politik. Hal ini mencakup pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Penugasan seseorang atau suatu kelompok untuk memenuhi berbagai tanggung jawab dalam sistem politik, khususnya dalam pemerintahan, disebut dengan pengangkatan.
- c. Partisipasi politik. Partisipasi politik melibatkan keterlibatan warga negara dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan dan pemilihan pemimpin.
- d. Arti "Artikulasi Kepentingan" adalah kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Misalnya, partai dapat mengadakan pertemuan atau mengundang berbagai kelompok kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang kebijakan publik.
- e. Pembuat kebijakan: Fungsi ini dilakukan oleh partai politik setelah mereka memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan di lembaga legislatif dan eksekutif. Partai politik memiliki kekuatan untuk membuat aturan pemerintah.

¹⁵ Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. 2019 (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Ke (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya menemukan kebaruan pada penelitian ini, tentu penulis melakukan eksplorasi dan analisis terhadap penelitian terdahulu. Dengan begitu penelitian yang ditulis diharapkan dapat memperluas dan melengkapi informasi terkait dengan fokus kajian yang diteliti. *Pertama*, Penelitian ini berjudul "Politik ekologi pada aras lokal (Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya, dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)"¹⁷. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dan melakukan wawancara mendalam dengan responden. Teori Politik Hijau yang dikembangkan oleh Burchill dan Linklater digunakan untuk memeriksa kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara anggota birokrasi desa tentang masalah yang dilematis. Di sisi lain, anggota masyarakat sekitar menentang pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di desa Tlogoretno, kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan.

Kedua "Analisis politik ekologi dalam pencabutan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum (studi atas dampak sosial lingkungan daerah aliran sungai musi kecamatan muara belida kabupaten muara enim)"¹⁸. Metode kualitatif dan deksriptif digunakan. Sumber data primer penelitian ini adalah pihak yang mengalami dampak sosial lingkungan sebagai akibat dari penghapusan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012. Sumber data sekunder penelitian ini adalah foto, lampiran, dan dokumen. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis politik ekologi ada dua peran aktor langsung dan tidak langsung.

¹⁷ Faizal Oktavian, "Politik Ekologi Pada Aras Lokal (Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya Dan Beracun Di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)" (Uin Sunan Ampel, 2020).

¹⁸ Ratna Sari, "Analisis Politik Ekologi Dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)" (Uin Raden Fatah Palembang, 2020).

Pencabutan peraturan memiliki dampak sosial lingkungan, termasuk pencemaran air, sungai, dan udara, dan dampak sosial meliputi pengurangan pendapatan masyarakat dan ancaman kesehatan masyarakat.

Ketiga "Ekologi politik dan dinamika sosio-ekonomi di dataran tinggi kabupaten pemalang, jawa tengah" adalah judul dari jurnal tersebut¹⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi politik dan kuantitatif berdasarkan data sekunder dan kualitatif. Ada keyakinan bahwa perubahan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh kebijaksanaan penduduk lokal, tetapi juga oleh intervensi negara dalam politik dan ekonomi melalui kebijakannya, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan keduanya berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani mengubah cara mereka membaca peluang ekonomi dengan mengembangkan tanaman baru dan pola migrasi. Di tingkat keluarga petani, pilihan ini akan membawa perubahan pada pola produksi yang biasa dan sehari-hari.

Keempat Jurnal dengan judul “ Partai Politik & Politik Hijau : Studi tentang Kepedulian Parpol terhadap Politik yang Prolingkungan di Kota Semarang”²⁰. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan analisis dokumen digunakan sebagai metode deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah bahwa partai politik jelas tidak menyadari politik hijau dan masalah lingkungan. Ini tercermin dari kurangnya kesadaran lingkungan yang ditunjukkan oleh visi, misi, platform, dan program mereka. Ironisnya, legislatif sebelumnya mewajibkan partai politik untuk melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah lingkungan hidup seperti banjir. Mereka memberlakukan hukum lanskap, meningkatkan anggaran lingkungan hidup kota, dan membangun kolam. Namun, legislatif saat ini masih belum direncanakan.

Dari beberapa literatur terdahulu yang sudah ada, memang sudah banyak yang membahas terkait dengan kajian ekologi politik. Mulai dari tingkatan lokal sampai global isu lingkungan

¹⁹ Nur Rosyid, “Ekologi Politik Dan Dinamika Sosio-Ekonomi Di Dataran Tinggi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10, No. 2 (2015): 125, <https://doi.org/10.14203/Jki.V10i2.72>.

²⁰ Supratiwi, “Partai Politik & Politik Hijau: Studi Tentang Kepedulian Parpol Terhadap Politik Yang Prolingkungan Di Kota Semarang,” *Jurnal Ilmu Politik* 2, No. 1 (2013): 109–17, www.kabarindonesia.com.

memang tidak akan pernah habis untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan penelitian. Semakin menjamurnya isu lingkungan inilah yang menjadikan penulis untuk tergerak mengkaji dan menganalisa mengenai ekologi politik. Yang menjadi berbeda dengan tulisan lainnya dari penelitian ini adalah penulis berharap bahwasannya mulai dari tulisan ini partai politik yang menjadi representasi penggerak dinamika perpolitikan dan embrio dari lahirnya kebijakan-kebijakan yang ada. Bisa berkomitmen dalam menangani problematika lingkungan hidup yang semakin kesini kurang diperhatikan. Khususnya dua partai politik yang akan dikaji inilah dengan warna dasar hijau bisa menjadikan motor penggerak partai yang peduli dengan lingkungan. Tulisan ini juga diharapkan bisa mewarnai dan melengkapi kekurangan-kekurangan pada kajian penelitian sebelumnya. Sehingga kajian ekologi politik ini memang benar-benar dijadikan sebagai trobosan untuk menangani problematika yang sedang terjadi saat ini.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini bertujuan supaya alur dalam melakukan penelitian ini lebih terarah dan menjadikan terbentuknya sebuah konsep yang jelas dan logis. Dalam suatu penelitian sangat penting untuk mengemukakan sebuah kerangka berfikir jika penelitian ini ada kaitanya dengan variabel tertentu. Secara istilah kerangka berfikir bertujuan untuk membentuk sebuah alur penelitian yang konkret dan bisa diterima secara akal.²¹

²¹ Dan Anis Endang Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, Vol. Vol. 1, 2022.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

